

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai inventarisasi dan legalisasi aset tetap khususnya kendaraan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat disimpulkan bahwa :

1. Inventarisasi aset tetap kendaraan belum optimal. Hal ini disebabkan pemindahtangan aset tetap kendaraan tersebut yang masih mengalami kendala. Kendala-kendala dimaksud antara lain : pengurusan dokumen seperti BPKB dan STNK kendaraan serta kurangnya pengetahuan dalam kegiatan inventarisasi
2. Dalam menginventaris aset tetap khususnya kendaraan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum mengikuti tata cara inventarisasi yang benar dan akurat hal ini dilihat dari *kualifikasi pendidikan khusus pada bidang Keuangan yang memiliki jumlah pegawai 8, dan yang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi khususnya jurusan Akuntansi hanya berjumlah 2 orang.*
3. Dampak yang akan ditimbulkan bila tidak dilakukan inventaris yaitu : aset tetap kendaraan tersebut tidak bisa menjadi milik dari pemerintah daerah khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah walaupun secara fisik dan digunakan oleh Badan tersebut.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan saran kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah

1. Melakukan inventarisasi aset tetap kendaraan dengan baik dan benar.
2. Perlu pelatihan kepada para pegawai dalam pelaksanaan inventarisasi aset tetap kendaraan bermotor maupun aset tetap lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Erlina, Rambe dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Salemba Empat. Jakarta
- Early Suandy dalam buku *Perencanaan Pajak Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini. 1994. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajahmada University
- Halim, Abdul. 2012. *Manajemen Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta
- Haryono. *Pengantar Akuntansi*. STIM YKPN. Yogyakarta
- Hayong, Regina. 2017. *Analisis Pengelolaan Aset Daerah Untuk Menilai Kualitas Laporan Keuangan*. Tesis S2, Program Pasca Sarjana Unwira. Kupang
<https://evaputranugraha.wordpress.com/2010/01/27/pedoman-inventarisasi-dan-penilaian-barang-milik-daerah/>
- I. Lemmer (2000; 65).....
- Kemnetrian Keuangan 2013 tentang Penatausahaan Barang Daerah pada SKPD
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Surat Sekretaris Utama Nomor B.4/BNPB/SU/RT.03.03/03/2015
- Surandi. 2009. *Akuntansi Pengantar I*. Edisi Pertama. Gava media. Yogyakarta
- Permendagri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan
Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme
Pengelolaan Hibah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintah